

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang kebijakan rotasi jabatan dalam mewujudkan pelayanan publik di kabupaten aceh tenggara (pada masa pemerintahan raidin pinin periode 2017-2022). Pertanyaan utama yang ingin di jawab dalam studi ini adalah Bagaimana Kebijakan Rotasi Jabatan dalam mewujudkan pelayanan publik pada masa Pemerntahan Raidin Pinim Priode 2017-2022 dan yang kedua Bagaimana pelayanan public di Aceh Tenggara paska rotasi jabatan, prespektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktural. prespektif ini menempatkan hubungan kekuasaan agen dengan struktur dualitas, yaitu stara, dan saling mempengaruhi. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif pengumpulan datannya melalui tiga tahap antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi, temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan Rotasi jabatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masa pemerintahan Raidin pinim Rotasi Jabatan di lingkungan pemerintahan daerah tentu tidak luput pula dengan namanya kepentingan politik, dari hasil observasi,dan wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan pada saat melakukan penelitian menjawab bahwa rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak lepas juga adanya kepentingan politik, namun bentuk daripada kepentingan politik tersebut adalah kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan, kedua alasan mendasar pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kerap melakukan rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan tersebut adalah dalam hal memperhatikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena kerap terjadinya pelanggaran sistem merit, Pelanggaran tersebut Saran yang ingin penulis sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah, jika rotasi mutasi yang ada di Aceh Tenggara dilakukan enam bulan sekali atau ada yang tiga bulan sekali ini sangat tidak baik, karena ini dapat menghambat kesempatan kepada seseorang untuk menunjukkan kinerjanya.

Kata Kunci: Rotasi jabatan, Pelayanan Publik, Kebijakan

ABSTRACT

This thesis examines the policy of job rotation in realizing public services in Southeast Aceh district (during the reign of Raidin Pinin, 2017-2022). The main question to be answered in this study is How is the Position Rotation Policy in realizing public services during the 2017-2022 Raidin Pinim Government period and secondly How is public service in Southeast Aceh after position rotation, the theoretical perspective used in this study is structural. This perspective places the relationship between the power of the agent and the structure of duality, namely *stara*, and influence each other. The research method used in this study is descriptive qualitative data collection through three stages including observation, interviews and documentation, the first finding in this study shows that the position rotation that occurred in Southeast Aceh District during the reign of Raidin pinim Position rotation within the local government environment is certainly not lacking also with the name political interest, from the results of observations and interviews with several informants in the field when conducting research the answer was that the rotation of positions carried out by the Southeast Aceh Regency government was also inseparable from political interests, but other forms other than political interests were personal interests for benefit, the two basic reasons the Southeast Aceh District government often rotates positions within the government environment are in terms of paying attention to improving services to the community, because of the frequent occurrence of system violations *te m merit*, the violation. The suggestion that I want to convey to the Southeast Aceh District government is, if the mutation rotation in Southeast Aceh is carried out once every six months or once every three months, this is not very good, because this can hinder a person's opportunity to show performance.

Keywords: Job rotation, Public Service, Policy